

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. "Metode Penelitian Hukum". Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*. (Malang: Setara Press, 2016).
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penaganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2011)
- _____. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*. (Yogyakarta: FH UII Press, 2009).
- Hunter, David et. Al. "International Development law and policy". New York: Foundation Press. 1998.
- IUCN (World Conservation Union), *Agenda 21: Earth Action Plan*. (New York: Oceana Publications, 1993).
- Manan, Bagir . *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka Otonomi Daerah*. (Bandung: Fakultas Hukum Unpad, 2000).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2013).
- Redi, Ahmad. *Hukum Pertambangan Indonesia: Pertambangan untuk Kemakmuran Rakyat*. (Jakarta: Gramata Publishing, 2014).
- _____. *Hukum Sumber Daya Alam: Dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Salim, Emil. *Pembangunan Berkelanjutan, Strategi Alternative dalam Pembangunan Dekade Sembilan Puluhan*. (Jakarta: Prisma. 1991).
- Siahaan, N.H.T. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. (Jakarta: Erlangga, 2004).
- Soemartono, R.M. Gatot P. *Hukum Lingkungan Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007).

Suyartono. *Good Mining Practice: Konsep tentang Pengelolaan Pertambangan yang Baik dan Benar*. (Semarang: Studi Nusa, 2003).

WCED (World Commission on Environment and Development), *Our Common Future*, (Oxford: Oxford University Press, 1987).

B. Jurnal

Bidara, Olden . *Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak dalam Teori dan Praktek Pemerintahan, dalam Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pmerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994

Dubinski, Jozef . “Sustainable Development of Mining Mineral Resources”, *Journal of Sustainable Mining*, Volume 12 Nomor 1, Tahun 2013.

Gironores, Enrique Orlegs, dkk. “Mineral Rights Cadastre: Promoting Transparent Access to Mineral Resources Extractive Industries for Development Series No. 4. Wahington DC. 2009.

Herning Sitabuana, Tunjung. “Penyelesaian Masalah Diskriminasi Terhadap Etnis Cina (Studi Tentang Perkembangan Politik Hukum di Bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia)”, Ringkasan Disertasi Doktor, Universitas Diponegoro. 2011.

Manan, Bagir. *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Peraturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*. Makalah, Tidak Dipublikasikan. 1995.

Nugraha, Prima, Budi Gutami, Henny Juliani, “Penerapan Status Clean and clear oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Minral Terhadap Ijin Usaha Pertambangan”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2017, hal. 4.

Vyas-Doorgapersad, Shikha, dan Coskun Can Aktan. “Progression from Ideal State to Good Governance: An Introductory Overview”. *International Journal of Business and Management Studies*. Volume 9 Nomor 1 Tahun 2017.

C. Website

Tim Komunikasi ESDM. “Penataan IUP: Bukan Semata-mata untuk Mencabut Izin”. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip->

berita/penataan-iup-bukan-semata-mata-untuk-mencabut-izin. Diakses tanggal 30 Agustus 2018.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

_____. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

_____. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

_____. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

_____. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

_____. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

_____. Peraturan Pemerintah P No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

_____. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

_____. Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Pertambangan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

_____. Peraturan Menteri ESDM No. 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

_____. Peraturan Menteri ESDM No. No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

_____. Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

_____. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan